

BAB 4

PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN AIR

4.1 Pertemuan Konsultasi Masyarakat

PKM seperti direncanakan dalam Laporan awal akan dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni, pada akhir jadwal kerja yang pertama dan jadwal kerja yang kedua. Dalam Pertemuan Panitia Pengarah yang membahas Laporan awal, disetujui bahwa Pra-PKM akan diadakan sesuai peninjauan lapangan pada tiga lokasi yang mewakili wilayah hilir, tengah dan hulu dari DAS Musi. Tujuan utama dari setiap PKM adalah sebagai berikut:

- Pra-PKM: Pengumpulan opini mengenai pengelolaan air, dan pengumpulan informasi dasar untuk pengidentifikasian permasalahan lingkungan pada DAS Musi di awal tahapan Studi.
- PKM (1): Klarifikasi permasalahan hasil identifikasi guna merumuskan Rencana Pengelolaan Air secara Komprehensif di DAS Musi, untuk disajikan dalam Laporan Kemajuan (*Progress Report*).
- PKM (2): Penjelasan Rencana Pengelolaan Air DAS Musi yang melibatkan penduduk setempat, pihak yang terkait (stakeholders), dsb., dan pembentukan suatu konsensus untuk implementasi proyek.

4.1.1 Pra-PKM

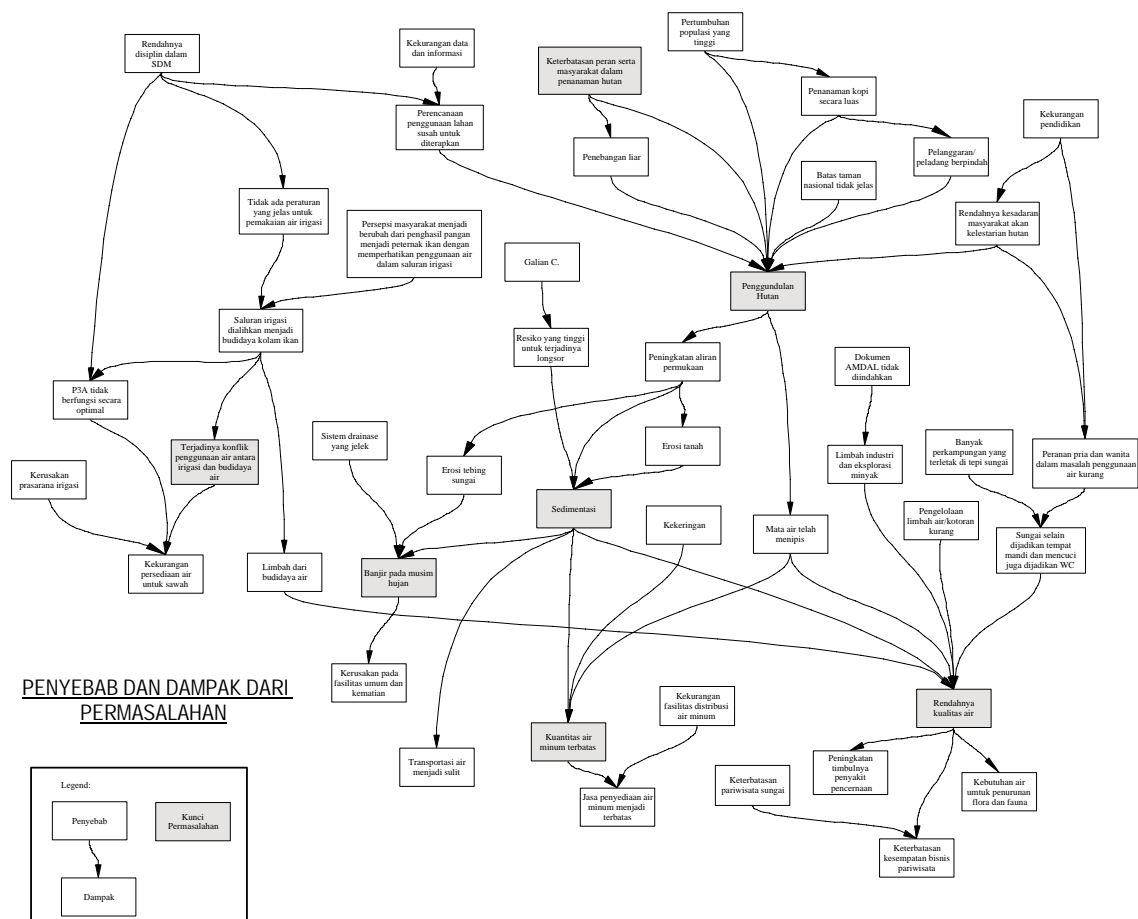
Pra PKM sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali pada bulan September bersamaan dengan peninjauan lapangan. Rangkaian kegiatan PKM disajikan pada Tabel 4.2.1. Setiap PKM diawali dengan diskusi antara Tim Peninjau/Koordinasi dan Tim Counterpart dengan JICA Study Team.

Tabel 4.1.1 Garis Besar Pra-PKM

	Daerah Bawah	Daerah Tengah	Daerah Atas
Tanggal	16 September 2002	20 September 2002	18 September 2002
Lokasi	Sekayu	Muara Enim	Lubuk Linggau
Kabupaten/ Kecamatan yang Terkait	Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin (MUBA), Ogan Komerling Ilir (OKI)	Muara Enim, Prabumulih, Ogan Komerling Ulu (OKU)	Musi Rawas (MURA), Lubuk Linggau, Lahat, Pagar Alam
Jumlah Undangan	- Wakil dari berbagai kelompok masyarakat - Pemerintah daerah dari instansi terkait		
Jumlah yang Hadir	42	33	48

Pra PKM terdiri dari dua bagian, yakni, diskusi kelompok masing-masing wilayah dan diskusi umum oleh seluruh peserta. Banyak sekali permasalahan yang ditampilkan oleh peserta dalam diskusi kelompok. Beberapa permasalahan disajikan dan sesi Tanya-Jawab diadakan pada diskusi umum. Hasil dari tiga kali Pra-PKM dapat disimpulkan sebagai berikut

- Permasalahan yang muncul dari peserta saling berhubungan satu dengan lain sekalipun permasalahan tersebut berasal dari sektor yang berbeda-beda. Sebagai contoh, sedimentasi tidak hanya berdampak terhadap timbulnya banjir tetapi juga terhadap pemakaian air. Oleh sebab itu, permasalahan tersebut harus diselesaikan secara komprehensif.
- Sering juga efek yang timbul disebabkan persoalan lainnya. Permasalahan tersebut akan semakin bertambah sebagai akibat rangkaian peristiwa yang lalu. Oleh karena itu, permasalahan yang ada harus di atasi dengan segera.
- Ada beberapa masalah umum yang ditemukan pada lokasi Pra-PKM, seperti, kekurangan air (untuk air minum dan irigasi), sedimentasi dan penurunan kualitas air. Jadi, pemerintahan daerah dapat berkerjasama satu dengan yang lainnya untuk mengatasi permasalahan secara efisien.
- Ditemukan juga adanya bagian perencanaan dari pemerintah daerah yang secara khusus mengatur mengenai masalah pengembangan P3A. Pembinaan kelembagaan seharusnya dipertimbangkan dalam penyusunan rencana induk.



Gambar 4.1.1 Ringkasan Hasil Pra-PKM

4.1.2 Hasil dari Pertemuan Konsultasi Masyarakat (1)

PKM (1) diadakan dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel 4.1.2 Garis Besar dari PKM (1)

Tanggal	Senin, 25 November 2002		
Tempat	Palembang (Ruang operasional Cipta Karya, Propinsi Sumatera Selatan)		
Daerah yang terkait/Kota	Daerah Hulu	Daerah Tengah	Daerah Hilir
	Musirawas (MURA), Lubuklinggau, Lahat, Pagaralam	Muaraenim, Prabumulih, Ogan Komerling Ulu (OKU)	Palembang, Banyuasin, Musibanyuasin (MUBA), Ogan Komerling Ilir (OKI)
Objek	- Konfirmasi permasalahan pengelolaan air yang dibahas pada Pra-PKM - Identifikasi pihak yang berkepentingan		
Jumlah Undangan	- Klien utama (untuk masing-masing masalah utama) - Pemerintah daerah dari instansi terkait		
Jumlah yang Hadir	78		

Permasalahan utama untuk daerah tengah adalah : kekeringan, kurangnya air minum, pencemaran sungai; sistem drainase kota yang tidak layak; belum terpenuhinya swasembada pangan; sungai juga dimanfaatkan untuk mandi, mencuci dan toilet. Permasalahan utama untuk daerah hulu adalah : permasalahan pembagian air untuk kepentingan persawahan dan kolam ikan. Peraturan daerah untuk pembagian air telah diusulkan, Dinas PU Perairan Kabupaten sedang mempersiapkan kriteria penggunaan air; dan penebangan illegal. Permasalahan utama untuk daerah hilir adalah sedimentasi, limbah industri; kekurangan serta rendahnya kualitas air minum; dan, terjadinya banjir pada musim hujan. Dalam pembahasan yang dilakukan masing-masing kelompok, beberapa program telah diusulkan untuk mengatasi pertentangan yang timbul dari masing –masing daerah hulu-tengah-hilir, yaitu berupa : reboisasi; memanfaatkan sungai untuk keperluan mandi, mencuci, dan toilet; mencukupi kebutuhan dan kualitas air minum; mencegah dan mengurangi pencemaran sungai; peningkatan penanganan masalah sampah; dan, memperbaiki sistem drainase.

4.1.3 Hasil dari Pertemuan Konsultasi Masyarakat (2)

PKM (2) berlangsung dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel 4.1.3 Garis Besar PKM (2)

Tanggal	Selasa , 25 Februari 2003
Tempat	Palembang (Ruang operasional Cipta Karya, Propinsi Sumatera Selatan)
Objek	- Mengumpulkan opini dari para peserta rapat mengenai rencana pengelolaan DAS Musi - Mempromosikan kerjasama yang aktif dalam pengelolaan air
Peserta	98

Sesi dari PKM (2) terdiri dari sesi umum dan sesi kelompok. Rincian kegiatan PKM (2) sebagai berikut : Pada sesi umum, dijelaskan Draft Rencan Induk termasuk program

utama dan implementasi dari rencana, dan dilangsungkan pembahasan. Kelompok Pembahasan dibagi dalam 4 kelompok berdasarkan metode "Analisis Alternatif", yaitu Penggunaan Air, Lingkungan Hidup, dan Kelembagaan dan Organisasi, yang dibagi berdasarkan latarbelakang peserta.

Hasil dari PKM (2) dirumuskan sebagai berikut :

- Jumlah peserta termasuk di dalamnya dari kalangan non-pemerintah meningkat dari 78 dan 13 dalam PKM (1) menjadi 98 dan 29 dalam PKM (2) karena Dinas PU Pengairan mengirimkan surat undangan secara langsung kepada pihak terkait dengan penjelasan yang cukup signifikan mengenai tujuan PKM (2).
- Masih perlu dipertanyakan apakah pendekatan partisipatif ini cukup efektif dalam menanyakan pendapat mengenai hal yang belum jelas yang memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap para pihak terkait seperti "rencana induk" dan "pengelolaan". Ini berbeda dengan hal-hal kongkrit yang mempengaruhi secara langsung seperti "proyek pembangunan" yang berlokasi di/tidak jauh dari pemukiman mereka. Dalam PKM (2), pihak yang ambil bagian diminta untuk tidak hanya membahas Rencana Induk sendiri tetapi juga program yang lebih diprioritaskan sesuai dengan usulan utama dari Tim Studi JICA untuk mengaktifkan pembahasan. Kelihatannya sulit bagi mereka untuk mendiskusikan sesuatu yang tidak berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri.
- Di sisi lain, lebih efektif bagi peserta yang berasal dari berbagai daerah berbeda untuk membahas objek kedua mengenai "promosi usulan kerjasama studi pengelolaan air " dengan pemahaman dan pengenalan yang lebih baik antara pihak yang ikut ambil bagian (stakeholder). Hal tersebut dapat terjadi jika topik pembahasan yang ada dalam kelompok sesuai dengan minat mereka. Berdasarkan konteks ini, sebaiknya peserta menyusun program tersebut sesuai dengan keinginan mereka sendiri sejalan dengan Kerangka Kerja Logis dan Siklus Pengelolaan Proyek.

4.2 Permasalahan Pengelolaan Air

Berdasarkan studi di atas, permasalahan pengelolaan air yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- (1) Penggunaan Air : kekurangan air; defisit keseimbangan air untuk masa yang akan datang; ketidakseimbangan air antara anak sungai; konflik sektoral; masalah pelayaran yang disebabkan oleh sedimentasi.
- (2) Lingkungan Hidup : menurunnya kualitas air (daerah kota dan pedesaan); rusaknya DAS; kondisi kehidupan yang buruk di daerah transmigrasi pasang surut .
- (3) Banjir : rusaknya masa pergantian musim (kemarau berkepanjangan); erosi tebing dan sedimentasi; kerusakan akibat banjir bandang; genangan hujan di daerah kota.
- (4) Kelembagaan : Diseminasi informasi yang tidak memadai; kurangnya panduan dalam penegakan hukum; kapasitas sumber daya manusia yang rendah; dan kurangnya koordinasi antara berbagai organisasi.